



## **Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung**

*Analysis of Regional Policy Implementation in Strengthening Cassava Industry Governance in Lampung Province (Literature Review)*

**Dita Purnama<sup>1</sup>, Adila Puspa Hestiantini<sup>2</sup>, Utami Nur<sup>3</sup>**

**E-mail Korespondensi: [ditapurnama@fisip.untan.ac.id](mailto:ditapurnama@fisip.untan.ac.id)**

Universitas Tanjung Pura, West Kalimantan, Indonesia

---

### **Info Article**

| **Submitted:** 3 November 2025 | **Revised:** 25 November 2025 | **Accepted:** 6 December 2025

| **Published:** 6 December 2025

**How it Cited :** Dita Purnama, etc., "Analisis Implementasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Industri Singkong di Provinsi Lampung", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2025, P. 177-190.

---

### **ABSTRACT**

Lampung Province is recognized as the largest cassava producing region in Indonesia, but the governance of its cassava industry continues to face persistent challenges, including price volatility, weak bargaining power among farmers, and the underdevelopment of downstream processing. This study aims to assess the effectiveness of regional policy implementation in strengthening cassava industry governance in Lampung, employing George C. Edwards III's policy implementation model, which highlights the dimensions of communication, resources, implementers disposition, and bureaucratic structure. This research adopts a qualitative approach through a literature review and policy document analysis by examining official provincial regulations such as Governor's Circular Letter No. 7 of 2025 and Governor's Instruction No. 2 of 2025 alongside academic references and supporting reports related to cassava market governance and agricultural commodity pricing. The findings indicate that policy implementation remains suboptimal, as reflected in limited dissemination of policy information, insufficient human and financial resources, low commitment among implementers at the operational level, and fragmented bureaucratic coordination. Existing policies tend to be normative and administrative, offering limited contribution to farmer welfare improvement or the strengthening of downstream industries. The study recommends enhanced cross-sectoral coordination, resource optimization, the establishment of a dedicated coordinating body for cassava governance, and the adoption of continuous evaluation mechanisms to promote a more effective and outcome-oriented governance framework for Lampung's cassava industry.

**Keywords:** policy implementation, cassava, regional governance, Edwards III, Lampung

### **ABSTRAK**

Provinsi Lampung dikenal sebagai wilayah penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun pengelolaan industrinya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya ketidakstabilan harga, posisi tawar petani yang rendah, serta proses hilirisasi yang belum berkembang optimal. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola industri singkong di Lampung dengan memanfaatkan model implementasi George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan, dengan menelaah berbagai regulasi resmi seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, serta referensi akademik dan laporan yang berkaitan dengan tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara efektif, ditandai oleh lemahnya penyebaran informasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat operasional, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Kebijakan yang ada cenderung bersifat administratif dan normatif sehingga belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani maupun penguatan sektor hilir. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya, pembentukan lembaga khusus

yang menangani tata niaga singkong, serta penerapan mekanisme evaluasi berkelanjutan guna memastikan tata kelola industri singkong yang lebih efektif dan berorientasi hasil.

**Kata Kunci:** *implementasi kebijakan, singkong, tata kelola daerah, Edwards III, Lampung*

## **Pendahuluan**

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kapasitas agraris yang sangat menonjol. Potensi tersebut tercermin dari tingginya produksi komoditas pangan, khususnya ubi kayu atau biasa disebut singkong, yang menurut data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung mencapai 6.719.088 ton. Capaian ini menjadikan Lampung sebagai daerah dengan produksi ubi kayu tertinggi di tingkat nasional (<https://dinastph.lampungprov.go.id/>). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Lampung memiliki kapabilitas yang kuat dalam pengembangan komoditas pertanian berskala besar. Lebih jauh, posisi Lampung sebagai wilayah yang digolongkan “lumbung pangan” tidak hanya retorika: produksi singkong di Lampung pada tahun 2023 tercatat mencapai sekitar 7,3 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki andil penting dalam rantai suplai nasional untuk komoditas singkong. Bahkan dalam sebuah laporan disebut bahwa luas tanam singkong di Lampung melebihi luas tanam padi dan jagung di beberapa kabupaten-sentra. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki landasan yang kuat untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama komoditas tanaman, termasuk singkong, dalam konteks nasional.

Ketersediaan lahan yang relatif luas, kondisi agraris yang mendukung, dan kehadiran investor besar di sektor tanaman memperkuat peran strategis Lampung dalam ketahanan pangan nasional (Ekonomi, Dan, Juepa, Juli, et al., 2024). Selain itu, dari perspektif pasar dan investasi, Lampung juga menjadi destinasi strategis bagi perusahaan besar di sektor perkebunan. Kehadiran perusahaan seperti PT Umas Jaya Agrotama dan PT Budi Acid Jaya yang beroperasi di provinsi ini, terutama pada sektor tanaman pangan dan perkebunan, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya agraris serta dukungan infrastruktur menjadi faktor penentu daya tarik investasi. Dengan demikian, kekuatan Lampung tidak hanya terletak pada potensi sumber daya alamnya, tetapi juga pada dinamika pasar dan peluang investasi yang berkembang di wilayah tersebut. Meskipun Provinsi Lampung memiliki potensi agraris yang besar serta peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius terkait stabilitas harga komoditas singkong. Fluktuasi harga yang cenderung tidak menentu menjadi permasalahan utama yang dirasakan oleh petani. Situasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan permintaan industri, terjadinya kelebihan pasokan. Data ditemukan pada tanggal 31 Januari 2025 petani dan para pelaku industri mematok harga singkong Rp.1.350/kg dengan potongan maksimal 15%. Akan tetapi kemudian

harga turun ke sekitar Rp 1.000 per kilogram. Sejak awal April 2025, harga sempat berada di level Rp 1.100 per kilogram, tetapi potongan rafaksi mencapai 30% hingga 38%. Akibat potongan besar tersebut, petani menerima hanya sekitar Rp 400–Rp 500 per kilogram setelah potongan. Produksi singkong (ubi kayu) di Lampung mencapai sekitar 6.719.088 ton, menjadikan Lampung menyumbang sekitar 39% dari total produksi nasional. Luas panen di salah satu kabupaten besar, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, mencapai 77.038 hektar, pada periode tertentu, serta struktur rantai pasok yang belum sepenuhnya berkeadilan (<https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-desak-pusat-putusan-harga-dan-mutu-singkong-berlaku-nasional> : diakses pada hari Senin, 24 November 2025 10:07 ).

Berdasarkan berbagai laporan media dan kajian kebijakan, sebagian besar komoditas singkong di Lampung masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku mentah seperti umbi segar atau diolah terbatas menjadi tapioka (Ekonomi, Dan, Juepa, & Juli, 2024). Upaya hilirisasi menuju produk bernilai tambah, seperti olahan pangan, bahan kimia, hingga bioplastik, masih belum berkembang secara optimal, meskipun kapasitas produksi daerah sebenarnya sangat mendukung investasi industri lanjutan. Hambatan utama dalam proses hilirisasi tersebut meliputi keterbatasan investasi, akses pembiayaan, teknologi pengolahan, dan akses pasar yang memadai. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat tata kelola rantai nilai singkong, meningkatkan posisi tawar petani, serta mendorong pengembangan industri hilir guna menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Lampung ([https://rri.co.id/daerah/1487848/lampung-desak-harga-singkong-nasional-dan-percepat-hilirisasi?utm\\_source](https://rri.co.id/daerah/1487848/lampung-desak-harga-singkong-nasional-dan-percepat-hilirisasi?utm_source)).

Fenomena dan dinamika tersebut, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa potensi ekonomi komoditas singkong di Lampung tidak hanya menghasilkan angka produksi yang tinggi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sebagai aktor utama dalam rantai produksi. Ketimpangan struktur pasar, lemahnya posisi tawar petani, serta belum optimalnya hilirisasi industri menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk merumuskan instrumen kebijakan yang mampu mengatur tata niaga, menstabilkan harga, mendorong investasi hilir, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan kompetitif bagi para pelaku usaha. Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi persoalan ini melalui upaya penyusunan regulasi daerah yang direncanakan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Lampung. Langkah ini diharapkan menjadi dasar normatif dalam memperkuat tata kelola komoditas

singkong secara lebih terarah, sehingga visi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi potensi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Menyikapi dinamika permasalahan tersebut, Plt. Gubernur Lampung Samsudin sebenarnya telah mengambil langkah awal melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 tertanggal 13 Januari 2025. Namun, implementasinya belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga kemudian dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 terkait penetapan harga ubi kayu di Provinsi Lampung. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah merumuskan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengelolaan komoditas singkong sebagai upaya strategis untuk memperkuat kerangka regulasi, menstabilkan harga, serta mendorong pengembangan industri hilir. Meski demikian, literatur kebijakan publik menegaskan bahwa efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan perumusannya, tetapi juga keberhasilan tahap implementasinya. Tantangan utama justru berada pada proses penerjemahan ketentuan normatif dalam Pergub ke dalam langkah operasional yang konkret di lapangan, termasuk kemampuan mengelola dinamika birokrasi, membangun koordinasi lintas pemangku kepentingan (petani, pelaku industri, asosiasi, dan pemerintah daerah), serta memastikan kecukupan sumber daya pendukung.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar implementasi kebijakan yang diantaranya:

1. (Wulandari & Rahman, 2014) Penelitian oleh Dian Ayu Wulandari dan Amni Zarkasyi Rahman (Universitas Diponegoro) berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Tegalmemanfaatkan teori Edwards III dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan LP2B belum berjalan secara maksimal. Faktor yang mendukung implementasi adalah disposisi para pelaksana, sementara aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, serta struktur birokrasi justru menjadi kendala utama. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada fokusnya yang sama-sama mengkaji implementasi kebijakan di sektor pertanian pada level lokal. Adapun perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan cakupan kebijakan yang dikaji.
2. (Lubis et al., 2012), Penelitian oleh Mitra Musika Lubis dkk. (2013) berjudul "Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara" menelaah sejauh mana kebijakan harga dasar pemerintah mampu melindungi petani dan menjaga stabilitas harga beras. Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini mengevaluasi rantai tataniaga, margin pemasaran, serta efisiensi distribusi beras di wilayah

Sumatera Utara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rantai pemasaran yang terlalu panjang menyebabkan ketimpangan margin keuntungan; pedagang besar memperoleh keuntungan terbesar, sedangkan petani justru menerima harga terendah. Studi ini menekankan urgensi perbaikan kebijakan harga dan tata niaga yang lebih adil dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus analisis implementasi kebijakan, sementara perbedaannya terdapat pada orientasi kajian yang menitikberatkan pada aspek distribusi dan ekonomi.

3. (Ak & Aziza, 2022), Penelitian oleh Agoes Thony Ak dan Aziza (2022) berjudul "Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Harga Gabah di Kabupaten Banyuasin" mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga gabah pada level daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan model implementasi Grindle, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan harga gabah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan, namun efektivitasnya belum maksimal akibat berbagai kendala internal maupun eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Studi ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan harga komoditas pertanian berjalan secara efektif, yang relevan dengan konteks pengaturan harga dan tata kelola komoditas singkong di Provinsi Lampung. Persamaannya dengan penelitian saya terletak pada fokus terhadap implementasi kebijakan, sedangkan perbedaannya berada pada objek kajian yang secara khusus menyoro ti harga gabah di Provinsi Lampung.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan (Ridwan et al., 2021). Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan penetapan harga singkong di Provinsi Lampung dengan menelaah berbagai sumber data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat daerah.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi dokumen kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, seperti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 05 Mei 2025, serta literatur akademik seperti buku, modul pembelajaran *ADPU4410* Universitas Terbuka, dan referensi ilmiah yang membahas teori implementasi kebijakan publik (khususnya model George C.

Edwards III). Selain itu, penelitian juga menggunakan publikasi ilmiah, laporan penelitian terkait tata niaga singkong dan kebijakan harga komoditas pertanian, serta sumber resmi dari media pemerintah dan kanal berita kredibel.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan analisis yang bersifat deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana kebijakan harga singkong diterapkan, serta sejauh mana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan dalam mendukung atau menghambat efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Lampung.

## **Hasil dan pembahasan**

### **4.1 Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Daerah**

Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat tata kelola komoditas singkong sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung tahun 2023, tercatat produksi singkong mencapai 7,3 juta ton, menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan produksi singkong terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem tata niaga yang efisien dan berkeadilan bagi para petani. Upaya mengatasi permasalahan ketidakefisienan tata niaga dan ketidakstabilan harga komoditas singkong, Pemerintah Provinsi Lampung telah menginisiasi sejumlah instrumen kebijakan yang bersifat regulatif maupun koordinatif. Beberapa langkah strategis tersebut antara lain diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pengendalian harga singkong di tingkat petani, serta Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penetapan harga dasar ubi kayu di tingkat provinsi sebagai acuan bagi pelaku usaha dan petani dalam transaksi jual beli.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang *Tata Kelola Komoditas Singkong* yang diarahkan untuk memperkuat aspek regulasi, meningkatkan kepastian usaha, serta mendorong hilirisasi industri singkong secara berkelanjutan. Namun demikian, hasil kajian pustaka dan analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai di lapangan, terutama dalam hal distribusi manfaat ekonomi bagi petani serta konsistensi penerapan harga acuan. Untuk mengidentifikasi faktor penyebabnya, penelitian ini menggunakan kerangka analisis model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang memandang keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Agustina, 2019). Melalui pendekatan ini, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dapat dievaluasi secara komprehensif, baik dari sisi koordinasi antarinstansi,

ketersediaan sumber daya pendukung, maupun komitmen pelaksana di tingkat lapangan.

## **4.2 Analisis Implementasi Berdasarkan Model George C. Edwards III**

### **A. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Buku Modul Pembelajaran (BMP) ADPU 4410 Universitas Terbuka, George C. Edwards III (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama yang saling berinteraksi dan memberikan pengaruh timbal balik dalam proses pelaksanaannya:

- I. Komunikasi: menekankan bahwa pesan yang disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana harus disampaikan secara tepat, jelas, konsisten, serta mudah dipahami agar tidak terjadi distorsi informasi dalam proses implementasi.
- II. Ketersediaan sumber daya: meliputi kecukupan tenaga pelaksana, informasi, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- III. Sikap dan disposisi pelaksana: mencakup orientasi, komitmen, serta perilaku birokrat atau pihak pelaksana yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga tidak menimbulkan resistensi maupun penyimpangan.
- IV. Struktur birokrasi menuntut adanya sistem prosedural yang baku dan terstandarisasi, serta penguatan koordinasi antarunit organisasi untuk menghindari fragmentasi kelembagaan yang dapat menghambat proses implementasi.

### **B. Komunikasi**

Efektivitas implementasi suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan berlangsung secara jelas, konsisten, dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian harga singkong di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai kendala. Proses penyampaian informasi kebijakan, baik yang tertuang dalam Peraturan Gubernur maupun Instruksi Gubernur, belum sepenuhnya menjangkau seluruh pemangku kepentingan, khususnya kelompok tani kecil, koperasi petani, dan pelaku industri pengolahan singkong. Informasi kebijakan cenderung terhenti di tingkat birokrasi menengah dan tidak diterjemahkan secara operasional dalam bentuk petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan. Akibatnya, banyak petani yang tidak memperoleh pemahaman utuh mengenai substansi dan tujuan kebijakan,

termasuk mekanisme penetapan harga dasar dan peran masing-masing pihak dalam rantai tata niaga. Selain itu, komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan kelompok petani masih sangat terbatas, sehingga aspirasi dan permasalahan yang muncul di tingkat akar rumput belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan (Wulandari & Rahman, 2014) yang menyatakan bahwa lemahnya komunikasi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian harga singkong di Lampung menuntut adanya mekanisme komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan terstruktur agar kebijakan yang dirumuskan dapat diterima serta dijalankan secara efektif oleh seluruh aktor yang terlibat.

### **C. Sumber Daya**

Aspek sumber daya merupakan salah satu faktor krusial yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tata kelola komoditas singkong di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil kajian, faktor ini masih menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah dan kapasitas aparatur pelaksana di tingkat lapangan masih terbatas, khususnya petugas yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengawasan, pemantauan harga, serta pendampingan kelompok tani. Kondisi ini menyebabkan proses implementasi kebijakan seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya tenaga teknis yang memahami substansi kebijakan serta mekanisme operasional di tingkat akar rumput.

Selanjutnya, dari aspek pendanaan, dukungan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk program stabilisasi harga dan penguatan rantai pasok komoditas singkong masih relatif minim. Belum terdapat pos anggaran yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penguatan kelembagaan petani maupun pengembangan infrastruktur pascapanen. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti fasilitas penyimpanan, transportasi, serta industri pengolahan hasil pertanian menyebabkan distribusi dan pengolahan singkong belum berlangsung secara efisien dan merata di seluruh wilayah. Keterbatasan sumber daya juga tercermin pada minimnya investasi sektor hilir akibat terbatasnya akses pembiayaan, risiko pasar yang tinggi, serta ketidakpastian harga jual di tingkat petani. Akibatnya, sebagian besar produksi singkong masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Temuan ini

mengindikasikan bahwa ketersediaan dan optimalisasi sumber daya belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tata kelola singkong di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, penambahan dukungan anggaran yang bersifat afirmatif, serta pengembangan infrastruktur dan kemitraan industri untuk memperkuat rantai nilai singkong secara berkelanjutan.

#### **D. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Disposisi pelaksana menggambarkan sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan aparat pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan adanya perbedaan tingkat komitmen dan pemahaman di antara pelaksana kebijakan pada berbagai jenjang birokrasi. Sebagian aparatur pemerintah provinsi menunjukkan kesadaran dan pemahaman yang cukup baik terhadap substansi serta tujuan kebijakan pengendalian harga singkong. Namun, pada level pelaksana di kabupaten dan kecamatan, komitmen tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi. Banyak di antara mereka masih menunggu instruksi teknis atau arahan lebih lanjut dari pemerintah provinsi sebelum mengambil langkah implementatif di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pelaksana kebijakan di tingkat bawah masih bersifat reaktif dan birokratis, bukan proaktif dan solutif. Minimnya inisiatif individu maupun kelembagaan dalam menindaklanjuti kebijakan menyebabkan pelaksanaan program menjadi lamban dan tidak adaptif terhadap dinamika di tingkat petani. Hal ini berdampak pada lemahnya proses *monitoring* dan evaluasi harga di tingkat produsen, yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasar.

Sikap birokrasi yang cenderung administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural, tanpa diimbangi dengan semangat pelayanan publik (*public service orientation*), turut memperlemah efektivitas kebijakan daerah. Situasi ini sejalan dengan pandangan Edwards III yang menekankan bahwa disposisi pelaksana merupakan elemen kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas, motivasi, dan kesadaran pelaksana kebijakan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar kebijakan tata kelola singkong di Provinsi Lampung dapat dijalankan secara konsisten dan berorientasi pada hasil (*outcome-based implementation*).

#### **E. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang kompleks menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan tata kelola komoditas singkong di Provinsi Lampung. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Perindustrian dan Perkebunan, yang masing-masing memiliki kewenangan dan

fungsi berbeda dalam rantai tata niaga singkong. Namun, koordinasi antarinstansi tersebut masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan integrasi kebijakan yang efektif. Ketiadaan lembaga atau forum koordinatif khusus yang secara eksplisit bertanggung jawab terhadap tata kelola dan tata niaga singkong menyebabkan pelaksanaan program di lapangan berjalan secara parsial. Fragmentasi ini berdampak pada tumpang tindih kegiatan antarinstansi, ketidaksinergisan dalam perencanaan program, serta rendahnya efektivitas kebijakan yang seharusnya saling mendukung antar sektor. Di sisi lain, mekanisme birokrasi yang panjang dan hierarkis menyebabkan proses pengambilan keputusan maupun respons terhadap fluktuasi harga pasar menjadi lamban.

#### **4.3 Analisis Komparatif dan Sintesis Temuan**

Secara komparatif, hasil analisis ini menunjukkan konsistensi dengan berbagai temuan penelitian terdahulu yang menyoroti permasalahan serupa dalam implementasi kebijakan publik di sektor pertanian. Studi yang dilakukan oleh (Wulandari & Rahman, 2014) mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terletak pada aspek komunikasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, (Lubis et al., 2012) menekankan pentingnya penerapan sistem tata niaga yang berkeadilan untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dalam kebijakan pengendalian harga beras. Di sisi lain, (Ak & Aziza, 2022) menemukan bahwa efektivitas kebijakan harga gabah sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi kelembagaan antar instansi pemerintah yang berwenang.

Konteks implementasi kebijakan tata kelola industri singkong di Provinsi Lampung, keempat faktor yang dikemukakan dalam model George C. Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menunjukkan keterkaitan yang erat satu sama lain. Komunikasi kebijakan yang belum berjalan efektif dan keterbatasan sumber daya baik manusia maupun anggaran berimplikasi langsung terhadap lemahnya disposisi atau komitmen pelaksana di tingkat bawah. Selain itu, struktur birokrasi yang belum terintegrasi dan masih bersifat sektoral memperburuk koordinasi antarlembaga sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mampu berjalan secara sinergis. Sehingga, implementasi kebijakan penguatan tata kelola industri singkong di Provinsi Lampung pada dasarnya masih berada pada tataran normative lebih menekankan pada aspek regulatif dan administrative namun belum mencapai tahap fungsional yang mampu mendorong efektivitas tata kelola ekonomi daerah secara menyeluruh. Diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi hasil (*outcome-oriented policy*) agar tata kelola komoditas singkong dapat berperan strategis dalam peningkatan kesejahteraan petani dan daya saing daerah.

#### **4.4 Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tata kelola komoditas singkong di Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme komunikasi kebijakan melalui pembentukan jalur koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kelompok tani, dan asosiasi pelaku industri tapioka. Forum koordinasi lintas aktor ini berfungsi sebagai ruang dialog dan pertukaran informasi dua arah sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Kedua, dibutuhkan reorientasi kebijakan pengelolaan sumber daya, yang mencakup peningkatan dukungan anggaran untuk program stabilisasi harga, penguatan kapasitas aparatur pelaksana melalui pelatihan teknis, serta pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi seperti fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Upaya ini akan memperkuat rantai nilai komoditas singkong sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Ketiga, diperlukan reformulasi struktur kelembagaan dengan membentuk Tim Koordinasi Tata Niaga Singkong Provinsi Lampung yang bersifat lintas sektor dan lintas instansi. Tim ini diharapkan dapat berperan sebagai lembaga penggerak dan pengendali utama dalam sinkronisasi program antar dinas, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Keempat, perlu diterapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif atau administratif, melainkan mampu menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya petani singkong. Evaluasi periodik yang berbasis data dan partisipatif akan membantu mengidentifikasi hambatan implementasi sekaligus memberikan dasar empiris bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

#### **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis literatur dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah dalam penguatan tata kelola industri singkong di Provinsi Lampung belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Keempat faktor utama dalam model Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menunjukkan adanya kendala yang saling berkaitan dan memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek komunikasi, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sosialisasi dan rendahnya keterlibatan aktor lapangan, khususnya kelompok tani dan pelaku industri pengolahan. Pada faktor

sumber daya, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum memadai, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan dan distribusi, turut menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Sementara itu, faktor disposisi pelaksana menunjukkan adanya variasi dalam tingkat komitmen dan pemahaman terhadap substansi kebijakan, terutama di level birokrasi pelaksana di daerah. Adapun struktur birokrasi yang masih bersifat sektoral dan fragmentatif menyebabkan koordinasi lintas lembaga belum berjalan sinergis, sehingga pelaksanaan kebijakan cenderung terfokus pada pendekatan administratif daripada fungsional.

Secara umum, kebijakan daerah yang telah dirumuskan melalui Surat Edaran Gubernur, Instruksi Gubernur, dan Rancangan Peraturan Gubernur baru sebatas membangun kerangka regulatif dan normatif. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh aspek operasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani, penguatan daya saing industri, serta stabilitas harga komoditas singkong di pasar. Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif serta berbasis kebutuhan nyata pelaku ekonomi daerah.

## **Saran**

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan tata kelola industri singkong di Provinsi Lampung menggunakan model George C. Edwards III, diperoleh sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaannya. Pertama, perlu dilakukan penguatan mekanisme komunikasi kebijakan melalui perluasan sosialisasi lintas sektor yang melibatkan petani, asosiasi singkong, pelaku industri, serta pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, disertai penyediaan pedoman teknis dan kanal informasi digital resmi untuk memastikan pemahaman yang merata.

Kedua, optimalisasi sumber daya pelaksana menjadi prioritas melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penyuluh, pemberian dukungan anggaran afirmatif, serta penyediaan fasilitas pascapanen, gudang komoditas, teknologi pengolahan, dan akses pembiayaan berbasis kemitraan. Ketiga, komitmen pelaksana dan partisipasi pemangku kepentingan perlu diperkuat melalui sistem monitoring berkala serta forum evaluasi harga dan kebijakan tata niaga yang melibatkan petani dan asosiasi industri. Keempat, reformulasi struktur birokrasi tata niaga singkong direkomendasikan melalui pembentukan tim koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi guna memastikan integrasi program, pengawasan, pemantauan harga, dan fasilitasi kemitraan industri. Kelima, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan berbasis data diperlukan untuk mengukur capaian kebijakan, memastikan keterlibatan petani, dan menilai dampaknya

terhadap stabilitas harga serta kesejahteraan petani. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, kebijakan tata kelola industri singkong di Provinsi Lampung diharapkan dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani maupun daerah.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, atas ketersediaan data dan informasi kebijakan mengenai tata kelola singkong.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata niaga singkong.
3. Akademisi dan praktisi tata kelola pertanian yang telah memberikan referensi dan kontribusi pemikiran.
4. Seluruh pihak terkait dalam rantai tata niaga singkong, termasuk petani, asosiasi petani singkong, dan pelaku industri tapioka di Lampung, yang menjadi dasar pengayaan perspektif dalam penelitian ini.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pertanian daerah dan peningkatan tata kelola komoditas strategis di Indonesia, khususnya singkong di Provinsi Lampung.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, N. Iaras. (2019). No Title. *ペインクリニック学会治療指針 2*, 1-9.
- Ak, A. T., & Aziza. (2022). Implementation Of Government Policies Toward Prices of Grain In Banyuasin District. *Jurnal Ilmiah Management Agribisnis*, 3(2), 157-172.
- Ekonomi, J., Dan, P., Juepa, A., & Juli, V. N. (2024). *Optimalisasi Pemasaran Ubi Kayu Melalui Pembentukan Kelompok Hasil Panen di Lampung Tengah*. 1(2), 71-83.
- Ekonomi, J., Dan, P., Juepa, A., Juli, V. N., Pangan, K., & Ekonomi, D. (2024). *Strategi Pengembangan Lada Hitam di Lampung Timur Menuju*. 1(2), 44-57.
- Lubis, M. M., Lubis, S. N., & Siregar, N. S. (2012). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Padi (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara* (Vol. 0404106501, Issue November 2014).
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). The Importance Of

Application Of Literature Review In Scientific Research. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42.

Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2014). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal: studi implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 696–708.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16179/15607>

#### Website Terkait:

<https://dinastph.lampungprov.go.id/>

[https://rri.co.id/daerah/1487848/lampung-desak-harga-singkong-nasional-dan-percepat-hilirisasi?utm\\_source](https://rri.co.id/daerah/1487848/lampung-desak-harga-singkong-nasional-dan-percepat-hilirisasi?utm_source)

Buku Modul Pembelajaran (BMP) ADPU 4410 Kebijakan Publik

#### Biografi Singkat Penulis



**Dita Purnama, S.I.P ., M.I.P** lahir pada tanggal, 14 Februari 1992 di Kota Metro Provinsi Lampung. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Safrudin dan Murniati. Setelah menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan (S.I.P). Kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister (S2) di Universitas Lampung, Fakultas Magister Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan (M.I.P). Penulis adalah dosen muda di Universitas Tanjungpura pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan.